



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANJAR GUNADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. NHK : 183369

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.403.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 592 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 207.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/190 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 696.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 396.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 278.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 32.307.000****D. SURAT BERTAHAP** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 124.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	29.200.000
Sub Total	Rp.	1.985.207.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.985.207.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.